BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Desa Menanga Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Menanga Kecamatan Solor Timur maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tahap Perencanaan Desa Menanga sudah melakukannya dengan baik hal ini dibuktikan dengan ada daftar hadir pada saat melaksanaankan musyawarah desa dan notulen hasil rapat rancangan APBDes dari Sekretaris Desa.
2. Tahap Penganggaran Desa Menanga sudah melakukan usulan dan rancangan APBDes sesuai dengan peraturan desa dalam satu tahun anggaran.
3. Tahap Pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan baik hanya pada saat pelaksana kegiatan tidak tepat waktu.
4. Pada tahap penatausahaan Bendahara Desa tidak melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran secara manual melainkan secara online. Hal ini akan menghambat jika mengalami gangguan jaringan.

5. Dalam tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa belum sepenuhnya melaporkan laporan realisasi dengan tepat waktu. Hal ini akan turut menghambat pada proses selanjutnya.

6. Pada tahap pertanggungjawaban pemerintah desa hanya melakukan pertanggungjawaban kepada camat dan bupati sedangkan di masyarakat mereka hanya menempelkan laporan pertanggungjawaban di papan informasi desa.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi saran untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Menanga Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Menanga diharapkan harus lebih memperhatikan pada setiap tahap pengelolaan keuangan desa.

2. Pemerintah Desa perlu meningkatkan pembinaan dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan desa secara berkelanjutan.

3. Diharapkan penelitian ini berguna bagi semua pihak khususnya Pemerintah Desa Menanga dan bagi masyarakat serta pihak yang terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Riyanto 2015. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual.* Yogyakarta

Arifiyadi, Teguh SH. 2008. *Konsep Tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia,* Jakarta.

Amstrong, E (2005) *Integrating, Transparency and Accountability in Public Administration: Recent Trends, Regional and Institutional Development and Emerging Issues. Economic and Social Affairs United Nation.*

Bogdan dan Taylor, 2010 J. Moleong, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remadja Karya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.* Jakarta: Pemeritah Republik Indonesia.

(BPKP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2016. *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.* Jakarta.

Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. *Pengelolaan Keuangan Desa.* Bandung: Fokus Media. 2014

Dubnick, M. J. 2003. *Accountability and Ethics: Reconsidering The Relationships. International Journal of Organization Theory and Behavior.* Vol.6, No.3. pp. 405-441.

Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia.* Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembangunan Desa (FPPD).

Furqani, Astri. 2010. "*Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi pada Pemerintahan Desa Kalimo, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep)". Tesis.* Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Huque, A. Shafiqul. 2011. Accountability and Governance: Strengthening extra-bureaucratic mechanisms in Bangladesh. *Internasional Journal of Productivity and Performance Management,* Vol.60 Iss.1. pp. 59-74. Canada: Mc. Master University.

Ismail, Muhammad, Ari Kuncara Widagdo, dan Agus Widodo. 2016. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis,* Volume XIX No.2. ISSN 1979-6471. Hal. 323-340. Solo: Universitas Sebelas Maret.

Kloby, K., (2009) "Less is More: Exploring Citizen-Based Financial Reporting in Local Government". *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management. Vol 21, No.3: 367-391*

Krina L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi.* Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kurnawan, Broni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun.* Buku 5. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

LAN dan BPKP, 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance.* Lembaga Administrasi Negara. Jakarta

Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Manopo, Delviyanti Cristin. 2016. *Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Penyelenggarakan Pemerintah Desa (Studi di Desa Warisa, Kecamatan Talawan Kabupaten Minahasa Utara). Jurnal Eksekutif,* Vol.1 No.7. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Mardiasmo. 2007. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik.* Edisi Lama. Cetakan Keempat. Yogyakarta: CV. Andi Offset. Hal.52

Moleong, Lexy J. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nyland, Karl and Pettersen, I. Johanne. 2015. Hybrid Controls and accountabilities in public sector management. *Internasional Journal of Public Sector Management,* Vol.22 Iss 2 pp. 105-120. Norway: Trondheim Business School.

Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik.* Bandung: Alfabeta

Sande, Peggy. 2013. *"Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)". Skripsi.* Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Setiawan, Andi, Muhtar Haboddin, dan Nila Febri Wilujeng. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. Jurnal Politik Indoneisa.* Vol. 2 No. 1. ISSN 2477-8060. Hal. 1-17. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa,* Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, CV

Skripsi. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Urut Sewu Kabupaten Kebumen Semarang.*

Skripsi. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008).*

Wahyuni, Putu sri, Sulindawati, Ni Luh Gede Erni, dan Herawati Nyoman Trisna. 2014. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Bandung). *e-Journal S1 Ak Jurusan Akuntansi Program S1,* Vol. 2 No. 1. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesya.

Buku Saku Dana Desa. 2017. https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf diakses 11 Maret 2018

Modul Pengelolaan Keuangan Desa

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 Tentang Keuangan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.